

KEMENANGAN IDEOLOGIS DAN KEKALAHAN POLITIK: WACANA POLITIK ETNIS MINANG DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DAN 2019

Abdullah Khusairi, Muhammad Nasir,
Ahmad Khoirul Fata

UIN Imam Bonjol Padang, UIN Imam Bonjol Padang, IAIN
Sultan Amai Gorontalo

abdullahkhusairi@uinib.ac.id,
muhammadnasir@uinib.ac.id,
cakfata@iaingorontalo.ac.id

Abstract

This article examines the political discourse of the Minang ethnic group in the Presidential Elections (Pilpres) of 2014 and 2019. In both elections, the Minang candidates did not win nationally but achieved a landslide victory in the West Sumatra province. This has created a stigma for the Minang ethnic group as one with a strong political identity and a province with a hardline stance. This study aims to understand the political discourse of the Minang ethnic group in choosing national leaders. The study employs Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach, which identifies four interconnected dimensions: linguistic, discursive, social, and ideological. This research is a qualitative study using critical analysis methods. Data was collected through in-depth interviews with Minang figures (traditional leaders, religious figures, politicians, academics, and cultural figures). The findings indicate that the political communication of the Minang ethnic group did not undergo a shift in perspective when it comes to viewing leadership issues. For the Minang ethnic group, a leader is highly regarded and given priority. Leaders must possess the qualities of "takah" (personal capacity and capability) and "tageh" (strength and firmness in attitude and action). Additionally, they must be recognized and accepted by the public as prominent figures. The most important factors for the Minang ethnic group in choosing a leader are shared religious beliefs, an egalitarian attitude, and adherence to customary values. The Minang ethnic group is willing to accept political defeat to maintain their belief-based selection of leaders.

Keyword: Political Communication, Minang Ethnic Group, Presidential Election, Minangkabau Custom, Leadership

Abstrak

Artikel ini mengkaji wacana politik etnis Minang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Pada dua Pilpres tersebut, pasangan calon yang dipilih etnis Minang tidak menang secara nasional namun menang telak di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuat stigma untuk etnis Minang sebagai salah satu etnis dengan identitas politik yang kuat dan provinsi garis keras. Artikel ini bertujuan untuk memahami wacana politik etnis Minang dalam memilih pemimpin nasional. Penulis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang mengidentifikasi empat dimensi yang saling terkait: bahasa, diskursif, sosial, dan ideologis. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kritis. Data-data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh Minang (tokoh adat, agama, politisi, akademisi dan budayawan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik etnis Minang tidak mengalami pergeseran perspektif dalam memandang persoalan pemimpin. Etnis Minang memosisikan pemimpin dalam dengan analogi ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Pemimpin harus memenuhi syarat takah, tageh dan tokoh. Takah adalah kapasitas dan kapabilitas personal, tageh adalah kuat dan kokoh dalam sikap dan tindakan. Sedangkan tokoh adalah keberterimaan publik terhadap dirinya. Menurut etnis Minang, hal paling utama dalam memilih adalah seiman dan seagama serta memiliki sikap egaliter. Etnis Minang rela kalah secara politik untuk tetap memilih pemimpin berdasar nilai-nilai adat yang diyakininya.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Etnis Minang, Pilpres, Adat Minangkabau, Kepemimpinan

Article History: *Received 22 July 2023, Revised: 15 August 2023, Accepted: 01 November 2023, Available online 30 December 2023*

Pendahuluan

Dalam sebuah wawancara, Mahfud MD menyebut beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat, sebagai provinsi garis keras (Ariefana and Yasir 2019; Kami 2019). Di kesempatan lain, politisi PDI perjuangan, Puan Maharani, membuat pernyataan kontroversial tentang Sumatera Barat. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan (Indonesia, 2020; Editor, 2020). “Tuduhan” bahwa Sumatera Barat sebagai daerah garis keras dan “tidak mendukung Pancasila” itu tidak lepas dari hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden di mana PDI Perjuangan dan capresnya, Joko Widodo mengalami kekalahan di provinsi terse-

but. Pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019, PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di Indonesia ternyata tidak mendapat satu kursi pun dari Sumatera Barat. Sementara Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019 juga kalah di provinsi tersebut (Detikcom, 2020).

Pernyataan dua petinggi negara tersebut sesungguhnya merupakan stigma negatif yang dilekatkan kepada suku Minang sebagai etnis yang mendiami provinsi Sumatera Barat. Tentu saja stigma politik ini bertentangan dengan watak etnis Minang yang selama ini terkenal egaliter dan demokratis (Kahin, 2008). Yunaldi menyebut kepemimpinan di Minangkabau telah memakai sistem demokrasi di tingkat nagari yang merupakan mini-state dari negara (Yunaldi 2021; Azwar et al. 2018). Selain itu, suku Minang merupakan etnis di Indonesia yang banyak menyumbangkan putra-putra terbaiknya bagi kemerdekaan Indonesia. Misalnya Ibrahim Dt. Sutan Malaka (1897-1949), Moh. Hatta (1902-1980), Sjahrir (1909-1966), H. Agus Salim (1884-1954), Muhammad Yamin (1903- 1962), Muhammad Natsir (1908-1993), dan Hamka (1908-1981).

Stigma negatif itu menyebar secara cepat dengan kehadiran media sosial yang banyak digunakan pada Pilpres 2014 dan 2019. Dengan pengaruhnya yang melampaui media konvensional, media sosial berperan penting dalam menciptakan polarisasi politik pada Pilpres 2014 dan 2019 (Khusairi ,2020; Rustandi, 2013). Pada dua pilpres tersebut media sosial di Indonesia dipenuhi dengan saling serang antara dua kubu dengan berbagai berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian. Luka akibat polarisasi politik itu hingga kini masih terasa, dan stigma negatif terhadap suku Minang oleh pejabat negara di atas merupakan sebagian residunya.

Pada titik ini teridentifikasi beberapa persoalan penting yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa PDI Perjuangan dan calon presiden yang diusungnya, Joko Widodo, tidak diminati warga Sumbar? Apakah hal itu sekedar persoalan praksis politik atau berkaitan

dengan konsep dan tata nilai yang diyakini suku Minang? Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi etnis Minang dalam menentukan pilihan politiknya? Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah bagaimana gambaran ideal pemimpin dalam pandangan etnis Minang, dalam hal ini tokoh-tokohnya?. Dari berbagai persoalan di atas, penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan terkait dengan sebab dan faktor yang menentukan pilihan politik suku Minang yang mendiami Sumatera Barat pada Pemilu/Pilpres 2014 dan 2019. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa faktor-faktor yang mempengaruhi warga Sumatera Barat yang sebagian besar beretnis Minang dalam memilih pemimpin?. Dalam membahas masalah ini penelitian ini akan mengkaji terlebih dahulu konsep kepemimpinan dalam imaji etnis Minang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough (2013). Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menganalisis teks, pesan, dan narasi yang terkait dengan kontestasi komunikasi politik etnis Minang dalam kampanye dan diskusi politik selama periode Pilpres 2014-2019. Menurut Fairclough, terdapat empat dimensi penting untuk menggali dan menganalisis wacana sebagai pendekatan penelitian, yaitu: dimensi bahasa, dimensi diskursif, dimensi sosial dan dimensi ideologi. Bahasa dapat membentuk dan mempengaruhi kekuasaan dalam berbagai konteks sosial dan dapat digunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan dalam masyarakat (I. Fairclough and Fairclough, 2012). Dimensi ini akan dioperasionalkan dalam menggali wacana Pilpres 2014 dan 2019 bagi etnis Minang yang dikenal sebagai “Kerajaan Kata-kata” (Drakard, 1999). Selain analisis dimensi bahasa, dimensi diskursif sebagai pendukung melihat wacana dalam konteks sosial dan institusional di mana suatu peristiwa terjadi (Dijk, 1993; I. Fairclough and Fairclough, 2012). Wacana diproduksi untuk membentuk opini, memperkuat ideologi, dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada (Leeuwen, 2008). Wacana Pilpres bagi etnis Minang adalah

bagian dari memilih pemimpin yang didasarkan perspektif budaya Minang. Keutamaan etnis ini memakai sistem kesukuan, keselarasan dan matrilineal (Kato, 1978; Hadler, 2008).

Melengkapi dua dimensi di atas, penelitian ini juga menggunakan wacana sebagai refleksi dari hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Wacana merupakan cermin yang memperkuat atau mengubah relasi kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda (N. Fairclough, 2003; Dijk, 1993). Minangkabau merupakan entitas budaya yang berdasarkan pada falsafah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Merantau sebagai salah satu tradisi etnis Minang juga telah menguji ketahanan dialektis terhadap pola pikir dalam menantang zaman (Naim, 1979). Dasar tiga dimensi di atas adalah ideologis. Dimensi ideologis merupakan landasan peran dalam wacana untuk mempertahankan atau menantang ideologi di luar dirinya (N. Fairclough, 2003). Landasan falsafah kehidupan etnis Minang adalah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS, SBK). Budaya yang didasari oleh hukum agama Islam (M.S., 2007; Kato, 1978).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh Minang yang berasal dari kalangan adat, agama, politisi, akademisi dan budayawan dengan materi konfirmatif dari hasil Pilpres 2014-2019 yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar dan KPU RI. Data lapangan itu kemudian diperkaya dan diperkuat dengan data-data yang bersumber dari terbitan ilmiah (buku, laporan penelitian, artikel jurnal) dan karya ilmiah populer/ jurnalistik di media online yang terkait pembahasan penelitian ini. Wawancara mendalam fokus pada persepsi mereka terhadap peristiwa politik Pilpres 2014-2019, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik, serta pandangan tentang pemimpin.

Memilih Pemimpin Atas Perspektif Adat dan Budaya

Menurut Fairclough (2015), bahasa merupakan alat untuk mempertahankan, memperkuat, atau menantang struktur ke-

kuasaan dalam masyarakat. Bahasa adalah alat untuk mengungkap wacana. Etnis Minang menggunakan wacana sebagai alat untuk membangun kebudayaan dan mentransformasikannya dari generasi ke generasi. Salah satu media yang digunakan adalah tambo. Tambo sebenarnya tidak tertulis tetapi ada dalam kepala setiap etnis Minang (Yazan and Khusairi, 2017; Suryami 2017).

Budayawan cum Akademisi, Sheiful Yazan Tk. Mangkudun mengakui, persoalan Pilpres bagi sebagian etnis Minang hanyalah sebagai peristiwa nasional yang datang dan pergi secara periodik (Yazan, wawancara, 2020). Kecuali para operator dan elit politik yang berasal dari Minang, etnis Minang cenderung memilih pemimpin berdasarkan pada alam pikiran dan budayanya. Dalam konteks seperti ini dapat dinyatakan bahwa Pilpres 2014 dan 2019 merupakan kemenangan etnis Minang secara ideologis, meski kalah secara politik. Bagi suku Minang, kekalahan merupakan hal yang biasa, bukan sesuatu yang bersifat aib, meskipun resiko secara politik akan didapatkan. Resiko seperti itu sudah beberapa kali dihadapi oleh masyarakat Sumbar dan ternyata mereka bisa.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKA-AM) Sumbar, Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, menyatakan bahwa hampir sulit mengelak dan sangatlah tepat jika dikatakan bahwa watak pemimpin pilihan etnis Minang adalah calon yang memiliki sifat-sifat Rasulullah Saw: amanah, siddiq, tabligh dan fathanah. Calon pemimpin dalam kontestasi apapun yang mendekati sifat ini akan langsung sebagai pilihan utama etnis Minang, termasuk Pilpres (Bahar, Wawancara: 2022).

Dengan demikian, tegas Bahar, loyalitas etnis Minang bukanlah pada tokoh tertentu, tetapi pada nilai-nilai yang diyakininya (Bahar, Wawancara, 2022). Masyarakat Minang sangat mempertimbangkan ke-takah-an seseorang. Takah berarti kepatutan secara penampilan dan kapasitas. Meski demikian, masyarakat Minang pun tetap menempatkan kebanggaannya pada seorang pemimpin secara proporsional. Ini sesuai dengan

falsafah “ditinggikan seranting, didahulukan selangkah” (Ka’bati, wawancara, 2022). Pandangan ini didukung pernyataan salah seorang ulama kharismatik Sumbar, Masoed Abidin.

“Tinggi sarantiang jombo-jomboan saranguik runtuh badaram, didahulukan cuman salangkah bajaran tungkai-tungkaian sahambua lompeklah tibo sadatiak wakatu nampak satitiak salah basuo baitu ukua jo jangko di dalam alam Minangkabau” (Abidin, Wawancara, 2022).

Artinya, pemimpin tidak jauh dari yang dipimpin. Bagi suku Minang, seseorang yang menjabat suatu posisi dan memimpin suatu kelompok haruslah bertindak proporsional dan profesional. Pemimpin juga harus bisa mengayomi, adil, bijaksana, bahkan siap berdialog dan berdebat panas dengan masyarakat.

“Bak kayu gadang di tengah koto ureknyo tampek baselo batangnyo tampek basanda dahannyo tampek bagantuang daun rimbunnyo tampek bataduah, tampek bahimpun hambo rakyat, pai tampek batanyo pulang tampek babarito, sasek nan kamanyapo tadorong nan kamanyintak, tibo dikusuik kamanyalasai tibo dikaruah mampajaniah, mahukum adia bakato bana” (Abidin, Wawancara, 2022).

Tentang keharusan bersikap adil, pepatah Minang menyatakan:

Manimbang samo barek (menimbang sama berat)
Maukua samo panjang (mengukur sama panjang)
Mambilai samo laweh (membelah sama besar/luas)
Baragiah samo banyak (membagi sama banyak)
Tibo di mato indak dipicingkan (tiba di mata tidak dipicingkan)
Tibo di paruik indak dikampihkan (tiba di di perut tidak dikempiskan)
Tibo di dado indak dibusuangkan (tiba di dada tidak dibusuangkan)
Bajalan di nan luruih (berjalan di jalan yang lurus)
Bakato di nan bana (berkata yang benar)
Bahukum adia manimbang (berhukum adil dalam menimbang) (M.S. 2007)

Pada Pilpres 2014 dan 2019 etnis Minang memang kalah secara politik. Mereka tidak mampu mengantarkan calon presiden yang dianggap mendekati kriteria idealnya menjadi presiden Republik Indonesia. Namun demikian, etnis Minang merasa telah mendapatkan kemenangan karena sang calon presiden idaman itu meraih suara terbanyak di wilayahnya (Sumbar). Hasil seperti ini cukup memuaskan bagi mereka. Dengan demikian, Pilpres 2014 dan 2019 menjadi kekalahan politik bagi etnis Minang, namun di saat bersamaan, juga menjadi kemenangan ideologis bagi mereka (Syafnir, Wawancara, 2022). Sikap lebih memenangkan nilai-nilai di atas pertimbangan politik praktis itu tergambar dalam pepatah-petitih berikut ini (Ka'batu, Wawancara, 2022):

Pakaian rajo banamo undang (pakaian raja bernama undang)

Pakaian panghulu banamo adat (pakaian penghulu bernama adat)

Pakaian ulama banamo syara' (pakaian ulama ialah syara')

Rancak nagari dek pangulu (rancak nagari karena penghulu)

Rancak tapian dek rang mudo (rancak tapian karena anak muda)

Rancak musajik dek tuangku (rancak mesjid karena tuangku)

Rancak rumah dek bundo kanduang (rancak rumah karena bundo kanduang) (M.S. 2007)

Hal di atas terkait dengan konsep kepemimpinan (leadership concepts), seseorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Ketika memilih pemimpin, etnis Minang mengikuti alur berpikir untuk menempatkan seseorang dengan tepat. Seperti terungkap dalam pepatah-petitih, berikut ini:

Alang tukang binaso kayu (Kepalang tukang, binaso kayu)

Alang cadiak binaso adat (Kepalang cerdik, binaso adat)

Alang alim rusak agama (Kepalang alum, rusak agama)

Alang pandai rusak nagari (Kepalang pandai, rusak negeri) (M.S., 2007)

Bila dibawa ke konsep modern, pepatah itu seirama dengan istilah *the right man in the right place*. Pepatah di atas mengan-

andung maksud sebaliknya, sebagaimana budaya etnis Minang yang sering menggunakan bahasa tidak langsung dalam berkomunikasi. Lebih tepatnya, istilahnya menjadi *the wrong man in the wrong place*. Jika pemimpin dipilih tidak tepat menurut takaran adat istiadat Minang, akan menimbulkan bahaya bagi yang dipimpin. Profesionalitas dalam memimpin menjadi ukuran penting bagi etnis Minang (Harmainy, Wawancara, 2022).

Menjadi pemimpin bagi etnis Minang adalah bukan perkara mudah karena yang dipimpin bisa menyanggah bila tidak berlaku adil dan menyelewengkan kekuasaan yang diberikan. Ini berkaitan dengan watak egaliter etnis Minang yang memegang teguh maksud pepatah “raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah” (Ka’bati, Wawancara, 2022). Sebab itu pemimpin memang seseorang yang harus bertanggung jawab dalam sikap dan tindakan. Pepatah berikut ini membantu untuk menjelaskannya:

Ka lauik indak bariak (ke laut tidak beriak)
Ka rimbo indak barangin (ke rimba tidak berangin)
Walau dibujuak ameh jo perak (walau dibujuk emas dan perak)
Indak bakucak lahia jo batin (tidak tergoyah lahir dan batin)
Namun niek dalam hati (namun niat dalam hati)
Satapak bapantang suruik (setapak berpantang surut)
Nan bana tatap dipasuntiang (yang benar tetap dipersunting) (Amir. 2007)

Memilih seorang pemimpin yang diimpikan untuk: Himaik pangka kato. Rajin pangka pandai. Ingek-ingek sabalun kanai. Bakulimek sabalun habih. Maminteh sabalun hanyuik (Abidin, Wawancara, 2022). Beberapa prinsip kepemimpinan yang berasal dari kearifan Minangkabau untuk membentuk masyarakat yang kuat dan berkarakter, antara lain adalah (1) Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana: yaitu menegakkan kebenaran sesuai peraturan; (2) Hilang nan ka mencari, anyuik ka maminteh, luluih nan ka manyalami: yaitu

perhatian yang besar pada masyarakat; (3) Indak lamak karano santan, indak kuniang karano kunyik: yaitu berpendirian dan berprinsip; (4) Kato putuih, biang tabuak: yaitu bijaksana dalam mengambil keputusan; (5) Tinggi tampak jauh, gadang tampak ampia: yaitu dapat menempatkan diri; (6) Bahari abih babadan litak, rantau jauh diulangi, rantau dakek dikana: yaitu senang dekat dengan masyarakat; (7) Bakato baiyo, bajalan bamolah, duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang: yaitu mengutamakan musyawarah; (8) Kapai tampek batanyo, pulang tampek babarito: menjadi tumpuan sebagai masyarakat; (9) Manimbang samo barek, maukua samo panjang, mamanggung samo merah: yaitu bertindak adil; (10) Tibo diparuik indak dikampihkan, tibo di dado indak dibusuangkan, tibo di mato indak dipiciangkan: yaitu memperlakukan sama semua orang; (11) Baalam laweh bapadang lapang: yaitu penyabar dan bisa menerima kritik; (12) Didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, dianjuang tinggi, diamba gadang: yaitu dekat dengan masyarakat, jaraknya hanya selangkah; (13) Singkek mauleh, lamah manahua, kurang manukuak, senteang mambilai: yaitu dapat memberi bantuan; (14) Kusuik ka manyalasai, karuah mampajaniah: yaitu dapat menyelesaikan masalah; (15) Pusek jalo pumpunan ikan, bukik timbunan kabuik, taluak timbunan kapa: yaitu menjadi tempat berpegang bagi masyarakat. (M.S., 2007)

Selain itu, etnis Minang juga sangat kritis dalam menentukan pilihan pemimpin (Fauzi, Wawancara, 2022). Etnis Minang sukar didikte dan diarahkan untuk memilih calon pemimpin tertentu. Sebab, sejak mengetahui nama-nama kandidat, mereka biasanya sudah punya pilihan sendiri dan pilihan itu teguh, sulit berubah (Fauzi, Wawancara, 2022). Fauzi membandingkan tingkat loyalitas dan fanatisme antara etnis Minangkabau dengan orang Jawa terhadap sesuatu atau terhadap tokoh. Etnis Jawa sangat kental dengan nuansa kerajaan, yang sejak dulu memaksa mereka untuk taat dan patuh kepada raja (Fauzi, Wawancara, 2022). Sementara etnis

Minang dari dulu sudah memandang semua orang berada dalam derajat yang sama (equality) (Bobi, Wawancara, 2022).

Sekretaris LKAAM Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang setuju dengan Fauzi Bahar. Dia menambahkan bahwa tidak hanya takah yang dijadikan ukuran, namun juga tokoh, tageh, dan juga toke. Kewibawaan seorang pemimpin harus melekat dan terlihat oleh rakyat setiap hari. Dalam nilai-nilai yang dipegang Masyarakat Minang, rakyat berhak dan dituntut berani menegur pemimpin, maka kewibawaan sang pemimpin menjadi begitu penting. Di sisi inilah terletak harapan tinggi rakyat pada sang pemimpin. Hal ini terefleksikan pada pepatah Himaik pangka kato, Rajin pangka pandai, Ingek-ingek sabalun kanai, Bakulimek sabalun habih, Maminteh sabalun hanyuik (Jasman, Wawancara, 2022).

Jasman menjelaskan, sikap tageh berarti tegas dan berani dalam bertindak dan bersikap serta mau menanggung resiko dalam memimpin. Sedangkan toke, adalah orang yang memiliki kekayaan yang lebih mapan dari yang lain. Pemimpin yang mapan dalam keuangan dimungkinkan mau berkorban dengan kekayaannya, juga sedikit kemungkinan melakukan penyelewengan kekuasaan untuk meraup kekayaan. Ini mengacu kepemimpinan penghulu kaum di Ranah Minang yang memiliki harta pusaka yang produktif, untuk memimpin kaumnya.

Dikatakan dalam pepatah minang berikut ini:

Kaluak paku kacang balimbiang — Relung pakis kacang belimbing
tampuruang lenggang-lenggangan — tempurung lenggang-lenggangan baik manurun ka Saruso — bawa menurun ke Saruaso tanam sirieh jo ureknyo— tanam sirieh serta uratnya
Anak dipangku kamanakan dibimbiang — Anak dipangku kamanakan dibimbing
urang kampuang dipatenggangan — orang kampung dipertenggangan

tenggang nagari jan binaso — tenggang negeri jangan binasa
 tenggang sarato jo adatnya — tenggang serta adatnya.
 (Yunus, wawancara, 2022).

Jasman juga menambahkan, jika seorang pemimpin telah memenuhi empat kriteria tersebut: tokoh, takah, tageh, dan toke, maka pilihan etnis Minang akan jatuh ke kandidat tersebut dan mereka akan teguh memegangnya. Meski calon yang didukung itu kalah dalam pertarungan Pilpres, namun etnis Minang tetap merasa menang karena telah teguh memegang prinsip-prinsip yang diyakininya. Jasman menambahkan, meski calon yang didukung mengalami kekalahan, masyarakat Minang tetap bisa menerima pemimpin yang memenangkan kontestasi.

Pendapat Fauzi Bahar, Jasman Rizal, juga didukung oleh Taufik Effendi, Sheiful Yazan Tuanku Mangkudun dan Zainal Tuanku Mudo. Taufik Effendi menyatakan, rasionalisasi nilai ABS SBK (adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah) terimplementasi secara sadar maupun tidak dalam diri etnis Minang. Nilai-nilai itu terkemas dalam sikap egaliter yang membuat orang Sumbar independen secara pikir dan tindak (Taufik Effendi, Wawancara, 2022).

Dengan independensi tersebut, orang Sumbar tidak kuning karena kunyit, tidak terpengaruh atribut yang menjadi jualan para Capres. Tetapi melihat tokoh dan takah. Ketokohan, ketakahan (penampilan/performance) tersebut menyebabkan orang Sumbar tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Taufik Effendi, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2018, menyatakan bahwa sebenarnya tidaklah sulit membuat etnis Minang menentukan pilihannya. Asal seorang calon pemimpin itu memiliki kriteria yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini masyarakat Minang, tentu orang tersebut akan dipilih tanpa harus kenal dan dekat secara berlebihan. Sebaliknya, meski calon tersebut sudah dikenal di tengah etnis Minang, jika dia dianggap jauh dari

kriteria prinsip di atas, maka masyarakat Minang susah memilihnya (Effendi, Wawancara, 2022).

Sheiful Yazan Tuanku Mangkudun menyebutkan, alam pikiran etnis Minang itu selalu akan melihat ketakahan seorang calon pemimpin dalam sebuah kontestasi. Takah memang termasuk selera, suka tidak suka, namun hal ini belum tentu terjadi pada etnis Minang di kota dan semi kota atau juga di perantauan. Karena, biasanya Etnis Minang yang berada di kota biasanya lebih cair lagi (Yazan, Wawancara, 2022).

Dialektika di Lapau Digital

Fairclough menyatakan, wacana diproduksi menjadi bahasa. Bahasa menjadi alat kekuasaan yang memiliki konteks sosial. Wacana tersebut sangat terkait dengan struktur kekuasaan, ideologi, nilai-nilai, dan representasi sosial yang ada dalam masyarakat. Istilah yang digunakan dimensi diskursif (N. Fairclough, 2003). Pada Pilpres 2014 dan 2019, media massa mengalami disrupsi informasi dengan hadirnya media sosial secara massif. Media sosial telah mengubah cara pandang etnis Minang sebagai bagian dari pengaruh kemajuan teknologi informasi.

Informan penelitian ini sepakat menyatakan, kehadiran media sosial telah membuat etnis Minang menjadi komunikasi sekaligus komentator. Media sosial menjadi tempat mengespresikan hasrat, gagasan, dan aspirasi politiknya. Konten di media sosial dan media massa merupakan asupan pengetahuan politik aktual etnis Minang, yang kemudian direproduksi menjadi bahan komentar baik bernada dukungan atau penolakan (Taufik Effendi, Wawancara, 2022). Media sosial menjadi ruang mengungkapkan sikap pro dan kontra. Ini kesukaan etnis Minang yang suka bertutur di lapau (lapak, kios, warung). Jika sebelumnya hobi bertutur itu dilampiasikan di lapau-lapau konvensional semacam warung kopi, kini terdapat saluran baru: lapau virtual (Khairul Jasmi, Wawancara, 2022). Sepanjang tahapan suksesi Pilpres 2014 dan 2019 etnis Minang maota di dua lapau tersebut.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar Heranof Firdaus menyatakan, pada Pilpres 2004 dan 2009, peran media sosial belum mendominasi wacana. Di masa itu media massa cetak, radio, dan televisi masih kuat pengaruhnya. Namun pada Pilpres 2014 dan 2019 dominasi media massa mungkin saja sudah dilewati oleh media sosial. Perang politik dalam Pilpres di media sosial sangatlah mengerikan karena dua pendukung hampir sudah melewati batas kepatutan.

Awalnya media massa menjadi sumber utama, kini ada media sosial didukung oleh media online sangat mendominasi karena kecepatan. Informasi langsung masuk ke android Etnis Minang. Ini berpengaruh besar dan membuat perbedaan dari masa lalu kita (Heranof, Wawancara, 2022).

Politik kekuasaan mendapat tempat di media sosial karena bisa dimainkan secara personal dan kelompok tanpa sensor. Buzzer dan influencer sebagai pasukan tiada kenal lelah menyerang lawan dan memenangkan jagoan. Realitas bahwa argumentasi yang ada jarang seimbang, justru masuk ke adu sentimen. Kalah argumen pakai sentimen. Pola ini terus dikembangkan di lini massa tanpa batas akhir. Energi terkuras dengan rasa tak pernah puas. Seakan-akan, dengan memenangkan pertikaian bisa memenangkan pemilihan dan mengantar calonnya ke tampuk kekuasaan padahal tidak sama sekali (Khusairi, 2020). Etnis Minang termasuk kelompok yang terbawa emosi tersebut (Lukman, Wawancara: 2022), di mana salah seorang calon di-framing seolah-olah dia sesuai dengan standar nilai etnis Minang. Sementara calon yang lain di-framing sebaliknya (Arif Nan Sati, Wawancara, 2022).

Para informan penelitian ini sepakat bahwa media sosial merupakan faktor baru yang sangat memengaruhi perspektif etnis Minang dalam memilih calon presiden. Media sosial menjadi wic channel dalam mengirim dan menerima pesan politik untuk memperkuat preferensi dukungan sesuai dengan kapasitas personal etnis Minang (Bachtul, Irawadi, Suardi, Candra, Ilham, Hamzah, dan Firdaus, wawancara, 2020).

Politisi beretnis Minang yang dianggap sesuai dengan kriteria tata nilai Minang dan memiliki kepedulian tinggi pada masyarakat, agama, dan budaya sangat digandrungi oleh etnis Minang. Di media sosial mereka didukung, walau masih ada yang mengkritisi karena faktor-faktor lain yang secara aliran politik berbeda (Irawadi Uska, Wawancara, 2020).

Irawadi Uska memberikan contoh kasus pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani “semoga Sumbar mendukung negara Pancasila”. Tanpa ampun, Puan Maharani menerima bullying oleh etnis Minang. Tokoh-tokoh penting Sumbar angkat bicara menyayangkan pernyataan yang dianggap melukai hati. Pernyataan Puan tersebut dianggap sebagai tuduhan seakan-akan selama ini masyarakat Sumbar tidak nasionalis.

Etnis Minang tidak pernah ketinggalan zaman dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Sejak ruang percakapan lama seperti Mailing List, Blackberry Messenger, hingga Whatsapp Group masyarakat Minang menggunakan teknologi tersebut untuk menyampaikan hasrat berkata-katanya (Khairul, Wawancara, 2021). Kehadiran media sosial menghasilkan disrupsi yang membuat perubahan signifikan dalam kehidupan umat manusia dalam mengonsumsi informasi. Media sosial telah mengubah peta jalan wacana dan kekuasaan yang sebelumnya didominasi oleh media massa lama. Malahan wacana media sosial sudah jauh menguasai publik dibandingkan media massa (Khusairi, 2020). Di titik ini perlu dilakukan penguatan literasi media agar pengguna media tidak mudah terbawa arus dan mampu memahami isi pesan politik dalam komunikasi menggunakan media massa.

Pengaruh Pesan Politik dari Rantau

Fairclough menyebutkan, wacana diproduksi dengan pengaruh aspek sosial-kognitif dan struktur sosial suatu masyarakat. Aspek kognitif dalam pemahaman dan produksi wacana memiliki hubungan dengan struktur sosial. Wacana menjadi cermin pemikiran, keyakinan, persepsi, dan pengetahuan sosial individu dan kelompok dalam masyarakat

(N. Fairclough, 2003; Anderson, 2000). Analisis dimensi sosio-kognitif melibatkan pemahaman tentang cara individu dan kelompok menggunakan bahasa untuk membangun dan mempertahankan pengetahuan dan identitas mereka (I. Fairclough and Fairclough, 2012).

Etnis Minang memiliki struktur sosial kekerabatan yang ketat karena menggunakan basis kesukuan, matrilineal dan budaya merantau (Naim, 1979). Ranah Minang memiliki tiga daerah yang disebut Luhak; Luhak Agam, Luhak Nan Bonsu, Luhak Tanah Data. Setiap daerah memiliki perbedaan, namun tetap sama dalam hal matrilinealitas dan adat istiadat. Hal ini telah membentuk suatu pandangan umum etnis Minang dalam memahami kehidupan dengan sebuah falsafah: Alam Takambang jadi Guru.

Tentang “rantau” atau “merantau”, aspek ini memberikan sumbangan penting bagi perkembangan kognisi sosial etnis Minang. Pada saat Pilpres 2014 dan 2019, tokoh-tokoh politik di tingkat nasional asal Minangkabau memiliki peran yang sangat besar menggiring etnis Minang baik di kampung maupun sesama “rantau Minang” untuk memilih calon yang didukungnya. Sungguhpun sikap egaliter etnis Minang dapat diakui memungkinkan untuk independen dan bebas dalam menentukan pilihan, namun faktanya, orang Rantau telah ikut andil mempengaruhi masyarakat Minang yang tetap tinggal di Sumatera Barat. Maka wajar jika banyak elite Minang di perantauan, yang telah bergabung di suatu partai politik atau menjadi tim sukses capres tertentu, meramaikan jagat kampanye di Sumatera Barat (Bahar and Tadjoeidin, 2004).

Kenyataan ini begitu disadari tokoh-tokoh masyarakat Minang semisal Jasmi dan Lukman. “Elite politik di tingkat nasional juga yang menentukan elit politik di tingkat lokal,” ujar Lukman (Wawancara, 2020). Elit Minangkabau yang berada di partai politik tingkat nasional tersebar di seluruh partai politik yang ada. Misalnya Fadli Zon dan Andre Rosiade di Partai Gerindra, Irma Chaniago dan Willy Aditya di Partai Nasdem,

sementara Indra J. Piliang dan Mulyadi di Partai Golkar. Pesan-pesan dari rantau yang dibawa oleh elit Minangkabau kebanyakan merupakan informasi seputar isu-isu politik nasional yang lagi hangat (Permana, Wawancara, 2020). Pada Pilpres 2014 dan 2019, pesan dari rantau disampaikan ke ranah Minang juga terbelah dua, antara Jokowi – JK / Jokowi – Ma'ruf Amin versus Prabowo -Hatta/ Prabowo - Sandi. Pada kedua Pilpres itu masyarakat Minang memenangkan pasangan Prabowo.

Pada aras ini terdapat keterkaitan antara “rantau” dengan “ranah” pada peristiwa Aksi Bela Islam (ABI) 212 yang berjilid-jilid. Terdapat banyak jaringan elit Minangkabau yang menjadi pentolan dalam aksi yang menuntut keadilan hukum itu, seperti Gusrizal Gazahar, Jel Fatullah, atau Fadli Zon. Semangat dari rantau itu berpengaruh kuat di “ranah” Sumbar. Dominasi tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau sangat besar, terutama yang berasal dari kalangan ulama, pebisnis, politisi, juga pedagang biasa. Pesan ABI 212 itu diterima masyarakat Minang yang berada di kampung halaman sebagai heroisme melawan ketidakadilan dan Sebagian lainnya menganggap sebagai jihad (Jasmi, Wawancara, 2020). Pendapat ini diperkuat dan lebih lengkap lagi, pesan dari perantau tersebut menjadi satu kesatuan antara tokoh agama di tingkat nasional dan lokal, konten media massa dan media sosial (Syafrizaldi Jpang, Wawancara, 2022).

Meski demikian, Henarof menjelaskan, elit Minang di rantau akan memiliki pengaruh kuat kepada masyarakat di ranah Minang jika mereka memiliki syarat lain: keteladanan seperti halnya Bung Hatta dan Buya Hamka (Heranof, Wawancara, 2022). Pada konteks sekarang, keterpengaruhan pesan dari rantau tersebut hampir sulit menyeluruh, kecuali ketika Pilpres 2009, di mana Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi memberi sambutan khusus dalam deklarasi SBY-Boediono. Faktor dukungan lain juga nyata, para perantau masih mendukung SBY-Boediono, sekalipun tidak sedikit para

perantau mengirim pesan politik agar Ranah Minang memenangkan Urang Sumando, Jusuf Kalla (JK) yang berpasangan dengan Wiranto, tetapi pesan itu hanya didengar semata. Hal yang sempat dielu-elukan ketika Pilpres 2004, di mana JK sebagai Urang Sumando dari Urang Awak.

Etnis Minang berada di semua level kehidupan di Indonesia namun untuk urusan politik dan pemilihan umum, sudah menjadi kebiasaan sanak saudara di kampung halaman mendengar para elite di Jakarta sebagai referensi. Semakin tinggi status sang elite di rantau dan menjadi kebanggaan di sebuah nagari, maka anak nagari akan mendukung langkah politiknya dan ikut mendukung pilihannya, termasuk dalam Pilpres (Kasmori Dt Rajo Nan Gadang, Zainal Tuanku Mudo, dan Erizal, Wawancara, 2022).

Namun demikian, orang rantau tidak lagi mendominasi seperti halnya pada masa lalu, ketika media massa dan media sosial belum mendominasi kehidupan etnis Minang. Penghargaan terhadap orang Rrantau sekalipun juga sudah mulai berbeda dari sebelumnya. Keterbukaan akses informasi menjadi berubah. Perubahan hubungan rantau - ranah bukan lagi hubungan antara perantauan dengan kampung halaman karena akses informasi yang kian cepat. Orang rantau merasa tidak lagi seperti merantau begitu jauh dan sulit pulang, begitu pula bagi orang yang ada di kampung, tidak pula merasa ditinggalkan oleh orang rantau.

Kota	Jumlah	Persentase
Seremban	282.971	50,9%
Pekanbaru	343.121	37,96%
Batam	343.121	14,93%
Tanjung Pinang	26.249	14,01%
Medan	181.403	8,6%
Lampung	74.071	8,4%
Banda Aceh	13.606	7,8%
Palembang	103.025	4,25%
Bandung	101.729	4,25%

Jakarta Raya	889.039	3,18%
--------------	---------	-------

Hal ini membuat politisi asal Minangkabau yang ingin calon yang didukungnya menang di ranah Minang tidak serta merta diikuti oleh orang-orang di ranah. Apalagi di masyarakat Minang sendiri terdapat sikap egaliter yang membuat mereka tetap memiliki rasa otonomi. Mereka tidak lagi serta merta ikut pilihan orang-orang rantau (Bahar, Wawancara, 2022). Kini suara elite rantau hanyalah satu di antara banyak pertimbangan bagi masyarakat Minang di kampung halaman. Sumber informasi lain yang turut mempengaruhi pilihan mereka adalah tokoh agama, media massa, dan media sosial (Israr Iskandar, Irawadi Uska, Zainal Tuanku Mudo, dan Suardi Sikumbang, Wawancara, 2022).

Secara historis etnis Minang dikenal memiliki budaya merantau di atas rata-rata etnis lain di Indonesia (Naim, 1979). Hampir seluruh kota dan pelosok di Indonesia ada etnis Minang, bahkan di seluruh penjuru dunia yang disebut diaspora Minang. Merantau adalah budaya bagi etnis Minang (Kato, 1978). Menurut data, jumlah etnis Minang adalah 6.462.713 jiwa atau 2,73 persen dari penduduk Indonesia, yang mendiami Sumatera Barat diperkirakan berjumlah 4.281.439 jiwa (BPS, 2010) selebihnya di luar Sumatera Barat atau disebut rantau.

Perantau Minang memiliki cukup pengaruh terhadap kampung halaman yang bersistem pemerintahan nagari dengan unit terkecil jorong (Welhendri, Wawancara, 2018), khususnya dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Ada pepatah yang sering diucapkan oleh etnis Minang, yaitu: Karatau matang di hulu, berbuah berbunga belum. Ke rantau bujang dahulu, di rumah berguna belum atau Daripada malu pulang ke kampung, lebih baik rantau diperjauh (Yazan, Wawancara, 2022).

Rantau bagi etnis Minang adalah bertuah. Ini termaktub dalam pepatah: Lautan sakti rantau bertuah. Sejarah panjang perantauan etnis Minang hingga mendunia menjadi kajian

tersendiri bagi banyak peneliti dan akademisi. Lebih-lebih yang berhasil dalam merantau. Bagi perantau Minang, kehormatan dan nama besar yang diperoleh akan dikenang. Mereka bisa tercatat sebagai tokoh-tokoh perantauan yang dibanggakan, entah itu sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Melayu Nusantara, saudagar/pengusaha besar, intelektual terkemuka, ulama penyebar agama Islam, politisi ternama, bahkan juga sebagai pendiri suatu kerajaan atau negara. Sementara yang gagal namanya hilang ditelan masa, yang sering disebut merantau cino.

Etnis Minang yang berprofesi sebagai politisi, pengusaha, birokrat, atau ulama di perantauan memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung. Pesan politik dari rantau bukan saja secara harfiah tetapi juga pengiriman simbol kesuksesan etnis Minang yang membanggakan ranah Minang. Hal ini sudah berlangsung lama, sebelum Indonesia merdeka, sudah terjadi dan justru mampu mengubah peta jalan kehidupan bumi nusantara. Sedangkan dalam konteks Pilpres, peran perantau khususnya para politisi dan pejabat negara yang memangku jabatan strategis dalam partai dan pemerintahan telah memberi andil kemana anak kamanakan diarahkan. Sungguhpun dianggap tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, namun beberapa bukti justru sangatlah ampuh.

Perantau masih memberi pengaruh besar dalam sosial ekonomi di kampung halaman. Walau diseret-seret ke wilayah politik, namun persatuan-persatuan perantau hampir sulit disatukan pada satu pilihan. Klaim sepihak elit Minang di rantau terhadap dukungan politik bukannya menjadi dukungan penuh di kampung halaman, malahan bisa sebaliknya. Organisasi Perantau Minang yang terkenal dan besar seperti Gebu Minang, Sulit Air Sepakat (SAS), atau Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) juga sangat cair dalam keanggotaan juga sering kali gagal menyatukan agar etnis Minang bersatu memilih antara calon yang tersedia dalam Pilpres.

Walaupun klaim elite organisasi perantau ini sampai ke kampung halaman namun belum tentu diikuti secara utuh. Perubahan telah nyata terjadi dalam Pilpres. Elite etnis Minang belum tentu mampu dan bisa meyakinkan orang kampung sendiri. Teori elite yang dikemukakan Robert Michels (1984) mulai kurang ampuh di era ini, lebih-lebih pada etnis Minang. Pesan elite dari rantau jarang diamini, kecuali Kok indak ado barado, indak tampuo basarang randah (jika tidak ada berada, tidaklah tempua bersarang rendah). Ini pula yang memiliki kohesi sosial dalam istilah lain: *sato sakaki*

Split Personality Egalitarianism

Melengkapi analisis wacana kritis atas dimensi-dimensi dari Fairclough, penelitian ini menemukan temuan tentang split personality di ruang publik bagi etnis Minang ketika mengalami perbedaan dalam pilihan pada Pilpres 2014 dan 2019. Etnis Minang memakai langgam kato (langgam kata) dalam berkomunikasi dimana pesan disampaikan sesuai dengan usia lawan bicara agar tujuan bisa sampai secara tepat dan mendapatkan pengaruh yang dikehendaki. Kesadaran kebudayaan ini sudah tumbuh dan menjadi “pakaian” dalam kehidupan sehari-hari. Alat untuk memenangkan pengaruh dan menguasai (power and personality) dalam berkomunikasi secara personal (Chouliaraki and Fairclough, 1999). Ada empat langgam yang dipakai oleh Etnis Minang, yaitu kato mandaki (kata mendaki), kato malereang (kata melereng), kato manurun (kata menurun), dan kato mandata (kata mendatar) (Navis, 1984).

Pada peristiwa Pilpres, ada anomali di luar hal di atas. Ditemukan kata tembak langsung etnis Minang kepada elite yang tidak mereka setuju dengan pesan dan kabar yang disampaikan. Tembak langsung adalah kato mandata yang biasanya kepada teman sepermainan atau sama usia. Ini terjadi karena tidak ada hubungan kekerabatan, tali temali hubungan seperti partai, organisasi, serta hal-hal lain yang membuat rasa segan bagi seseorang untuk menyatakan ungkapan tembak

langsung. Etnis Minang terbiasa berkomunikasi dengan kiasan, tetapi dalam Pilpres ditemukan kata-kata kasar kepada elite karena perbedaan pilihan dengan elite tersebut. Di media sosial banyak ditemukan kata-kata kasar oleh etnis Minang terhadap pasangan Jokowi - JK dan Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Teori elite yang dikemukakan Gaetano Mosca tentang *The Ruling Class* (kelas berkuasa) (Krauss, 2011), bisa tidak berlaku di etnis Minang. Teori itu hanya berlaku jika terdapat hubungan kekerabatan, itupun bisa tertolak jika tidak ada intensitas komunikasi yang baik. Inilah yang terjadi pada etnis Minang dalam Pilpres, yang tepat disebut sebagai *split personality* bagi mereka. Sesuatu yang berbeda dari yang umum dan berani menyatakan pilihlah dek apak, kami indak doh; Dukunglah dek apak, kami yo ndak doh! (Pilih saja sama bapak, kami tidak. Dukunglah oleh bapak, kami tidak). Ini bentuk respon dari etnis Minang ketika elite, yang terdiri dari para pengulu adat mereka, bukan dari kaumnya mengkampanyekan dan mendukung salah satu pasangan calon presiden (Yazan, Wawancara, 2020).

Kubu-kubuan dalam Pilpres 2014 dan 2019 juga terjadi pada etnis Minang. Sindir menyindir juga terjadi. Bahasa-bahasa sarkas dan hiperbolik juga tampil untuk menyudutkan salah satu pasangan calon presiden. Polarisasi seperti cebong-kampret secara nasional juga menjadi bagian yang tak terelakkan. Bukan lagi persoalan ideal tidak ideal dari calon pemimpin yang hendak dipilih, tetapi telah berubah lebih kepada selera, rasa, serta eskapisme dari calon lain yang tidak disukai, sekalipun sebenarnya yang mereka pilih, mereka dukung, bukanlah yang ideal dan mendapat dukungan sepenuhnya.

Ada yang memilih karena termakan framing yang dimainkan kandidat, yang terkesan dekat dengan ulama atau dekat dengan Islam. Hal ini amat jauh dari rasionalisasi yang selama ini kerap disematkan kepada Etnis Minangkabau (Muhammad Arif Parpatiah Nan Sati, Wawancara, 2022).

Split personality etnis Minang terjadi karena pengaruh langsung Sato Sakaki terhadap dirinya. Jika salah seorang kandidat dinilai sudah memenuhi kriteria, etnis Minang akan langsung menjatuhkan pilihan ke kandidat tersebut. Pilihan ini akan sulit berubah, meskipun tokoh-tokoh atau tetua masyarakat memaksa atau membujuk mereka untuk memilih kandidat lain (Jasman, Wawancara, 2022).

Budaya Minang mengenal “dalam angguk belum tentu iya, dalam geleng belum tentu tidak”. Dalam budaya etnis Minang, juga berlaku komunikasi personal seolah-olah menjelek-jelekan, namun ini bukanlah hujatan, bahkan sebaliknya, merupakan pujian. Ini akan kelihatan pada nada dan konteks pembicaraan. *Split Personality* yang lepas dari tatanan adat Minang ini dapat bermakna: Pilpres bukanlah peristiwa sakral budaya dalam memilih pemimpin seperti halnya kepemimpinan dalam kaum-kekerabatan (Yazan, Wawancara, 2022). Peristiwa Pilpres tampak lepas dari peristiwa budaya. Itu hanya berupa even nasional yang datang, pergi, dan profan. Ini mengacu kepada pepatah yang muncul kok kayo, kayo suranglah kami indak mamintak; kok cadiaak, cadiaak suranglah, kami indak ka batanyo (Jamil, Wawancara, 2022). Kalau kaya, kayalah sendiri, kami tidak meminta; kalau cerdas, cerdaslah sendiri, kami tidak akan bertanya. Maksudnya, etnis Minang sangat mandiri dan egois bertahan dalam negosiasi terhadap kepentingan di luar dirinya, kecuali negosiasi tersebut memiliki representasi kepentingan dalam hal transaksional (Ting-Toomey and Kurogi, 1998).

Pesan-pesan yang mengemuka saat Pilpres yang diproduksi oleh etnis Minang di ruang publik, melalui media sosial dan lapau-lapau kopi, tak dapat dielakkan banyak yang bercampur dengan hoax dan fake news. Bagi etnis Minang, Pilpres adalah hal yang lepas dari peristiwa budaya, namun masih tetap persoalan agama, ideologi dan garis perjuangan yang mereka ketahui sebagai pengetahuan umum. Menyangkut calon dan elite yang dibicarakan seputar isu korupsi, juga kurenah, tabiat,

perilaku elite selalu menjadi bahan cemooh, sarkas, untuk tujuan nihilisasi tujuan pesan elite. Lebih tepatnya adalah antipati bagi etnis Minang bergeser menjadi cemooh.

Paling dominan dalam penyampaian pesan politik dalam dinamika wacana Pilpres adalah tokoh lokal karena budaya lisan itu menjadikan orang Sumbar lebih aktif dalam memproduksi pesan. Sedangkan pesan atau tema yang paling sering diproduksi oleh Etnis Minangkabau dalam wacana Pilpres adalah tema agama. Selain itu jika isu tersebut “mengena” maka orang Sumbar akan merespon secara aktif contohnya isu agama dan isu PKI, dan respon yang diberikan cenderung mendahului emosi dengan sumber isu yang berasal dari konten di media sosial. (Taufik, Wawancara, 2022).

Tema religiusitas *vis a vis*, komunis merupakan what paling meriah dibicarakan sepanjang Pilpres sebagai bentuk respons aktif etnis Minang. Hal ini beriringan dengan kesan penyampaian nilai-nilai humanis, agamis, dan apa adanya terhadap calon yang didukung. Dibumbui dengan apologi terhadap kebesaran masa lalu tokoh Minang, semacam romantisme yang diharapkan kembali terulang.

Etnis Minang sering memproduksi pesan primordial, religiusitas, juga kebesaran masa lalu tokohnya. Kalau sudah menjatuhkan pilihan, etnis Minang jarang berubah, apalagi sudah dianggap sesuai dengan representasi nilai yang dianutnya (Esa, Wawancara, 2022). Sungguhpun begitu, kedua calon yang head to head, juga akan menerima cemooh oleh yang mendukung apalagi yang tidak mendukung, malahan lebih pedas dan sarkas. Hal itu memperlihatkan etnis Minang memilih bukan karena kesetiaan penuh kepada personal calon.

Namun pemaknaan terhadap pernyataan-pernyataan itu bagi sesama etnis Minang bukanlah sesuatu yang membahayakan atau mengandung kebencian, hanya sekedar permainan kata, silat kata, sebagai bentuk ekspresi budaya lisan (Suryadi, 2020). Ini yang tidak dipahami oleh elite politik dari luar kalangan etnis Minang. Pernyataan para pasangan calon,

para elite seputar Pilpres selalu menjadi bahan satire tingkat tinggi pada etnis Minang. Kedua kubu berseteru dalam bingkai komunikasi yang bukan lagi terhadap kepentingan Pilpres tetapi memerlihatkan watak, peran, sikap dan posisi secara personal. Tidak lagi mewakili budaya etnis Minang secara utuh. Ini yang disebut *split personality* di luar jalur budaya etnis Minang.

Kesimpulan

Pilpres 2014 dan 2019 telah memberi kesempatan tumbuh subur nya identitas ke-Minang-an yang berpijak pada filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ASB, SBK). Bagi etnis Minang, kekalahan calon yang didukung dalam Pilpres bukanlah aib, namun justru menjadi kebanggaan sebagai kemenangan ideologis untuk memperlihatkan sikap kekokohan dalam berpendapat dan bertindak secara bertanggung jawab. Etnis Minang mengokohkan identitas politik yang berdasarkan pijakan budaya, dan budaya berdasarkan pada agama, yang merupakan ideologi yang diyakini sebagai sebuah kebenaran tanpa perlu ditakuti dan diratapi.

Sikap dirkursif dalam tatanan adat dan budaya Minang membuat etnis Minang mengerti posisi (*bargaining*) dalam negosiasi, sesuatu yang sulit dipahami oleh suku lain. Etnis Minang juga memakai filosofi berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Sikap *equality* tersebut mendorong tumbuhnya egalitarisme dalam masyarakat, sehingga strata sosial hadir bukan dalam arti stratifikasi sosial, namun lebih pada diferensiasi. Ketundukan hanya pada posisi yang bisa jadi akan tertukar pada suatu saat, sehingga etnis Minang memahami kekalahan sebagai sesuatu hal yang lumrah. Satu hal yang perlu diketahui, etnis Minang sangat suka diajak untuk sato sakaki, sebuah ruang negosiasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan.

Daftar Rujukan

- Anderson, Benedict R. O'G. 2000. *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kuasa Kata.
- Ariefana, Pebriansyah, and Muhammad Yasir. 2019. Mahfud MD Sebut Jabar, Sumsel, Aceh, Dan Sumbar Provinsi Garis Keras. *Suara.Com*. 2019. <https://www.suara.com/news/2019/04/28/101107/mahfud-md-sebut-jabar-sumsel-aceh-dan-sumbar-provinsi-garis-keras>.
- Azwar, Welhendri, Yulizal Yunus, Muliono, and Yuli Permatasari. 2018. Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Bina Praja* 10 (2): 231–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.231-239>.
- Bahar, Saafroedin Bahar, and Mohammad Zulfan Tadjoeddin. 2004. *Masih Ada Harapan: Posisi Sebuah Etnis Minoritas Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*. Jakarta: Yayasan Sepuluh Agustus-Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.
- Chouliaraki, Lilie, and Norman Fairclough. 1999. *Discourse In Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Detikcom, Tim. 2020. Cerita PDIP Di Sumbar: 3 Pemilu Tak Dapat Kursi, Jokowi Kalah 2 Kali. *Detik.Com*. 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5159197/cerita-pdip-di-sumbar-3-pemilu-tak-dapat-kursi-jokowi-kalah-2-kali>.
- Dijk, Teun van. 1993. *Principles of Critical Discourse Analysis*. London: Discourse & Society.
- Drakard, Jane. 1999. *A Kingdom of Word: Language and Power in Sumatra*. Oxford: Oxford University Press.
- Editor, Tim. 2020. Soal Harapan Puan Maharani Agar Sumbar Jadi Provinsi Yang Dukung Pancasila. *Kumparan.Com*. 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/soal-harapan-puan-maharani-agar-sumbar-jadi-provinsi-yang-dukung-pancasila-1u7vhQx6yST/full>.
- Fairclough, Isabela, and Norman Fairclough. 2012. *Political Discourse Analysis: A Method for Advanced Students*. London: Routledge.
- Fairclough, Norman. 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis For Social Research*. London & New York: Routledge.
- . 2013. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London & New York: Routledge.
- . 2015. *Language and Power*. New York: Longman.
- Hadler, Jeffrey. 2008. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat,*

- Reformisme Islam, Dan Kolonialism Di Minangkabau. Jakarta: Freedom Institute.
- Indonesia, CNN. 2020. Puan: Semoga Sumbar Jadi Provinsi Pendukung Negara Pancasila.” Cnnindonesia.Com. 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902172953-32-542086/puan-semoga-sumbar-jadi-provinsi-pendukung-negara-pancasila.%0A%0A>.
- Kahin, Audrey. 2008. Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat Dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia.
- Kami, Indah Mutiara. 2019. Heboh Ucapan Mahfud Md Soal ‘Provinsi Garis Keras. Detik.Com. 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4528441/heboh-ucapan-mahfud-md-soal-provinsi-garis-keras.%0A>.
- Kato, Tsuyoshi. 1978. Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System. *Indonesia* 25: 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3350964>.
- Khusairi, Abdullah. 2020. Teologi Informasi: Refleksi Wacana & Literasi Media. Padang: Rumah Kayu.
- Krauss, Jeffrey. 2011. *Encyclopedia of Political Science*. CQ Press.
- Leeuwen, Theo Van. 2008. Discourse as the Recontextualization of Social Practice. In *Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis*, 3–22. New York: Oxford Academic. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195323306.003.0001>.
- M.S., Amir. 2007. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Studi Sosiologis Tentang Kecenderungan Oligarki Demokrasi Modern*. Jakarta: Rajawali.
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti.
- Rustandi, Dudi. 2013. Pencitraan Politik Daring: Strategi Memenangkan Massa Digital Menjelang Pemilu 2014. *Observasi* 11 (2): 93–118.
- Suryadi. 2020. Masa Depan Seni Bersilat Lidah Minangkabau. *Padang Ekspres*, May 20, 2020.
- Suryami, NFN. 2017. Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau. *Kandai* 10 (2): 203–15. <https://doi.org/10.26499/jk.v10i2.323>.

- Ting-Toomey, S, and A Kurogi. 1998. Framework Competence in Intercultural Conflict: An Updated Face-Negotiation Theory. *International Journal of Intercultural Relations* 22: 187–225. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(98\)00004-2](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(98)00004-2).
- Yazan, Sheiful, and Abdullah Khusairi. 2017. Jejak Islam Dalam Naskah-Naskah Tambo Minangkabau. *Turats: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5 (1): 13–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/turast.v5i1.356>.
- Yunaldi, Wendra. 2021. *Nagari Dan Negara: Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta.
- Wawancara
- H. Leonardy Harmainy, MBA, Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), R.I. Wawancara, 2022.
- Dr. Yulizal Yunus, M.Si, Dt. Bandaro Basa, Akademisi, Budayawan, Wawancara, 2022
- Sheiful Yazan. Tuanku Mankudun, Budayawan, Akademisi, Wawancara, 2022.
- Khairul Jasmi., Wartawan Utama, Budayawan Sastrawan, Wawancara, 2022.
- Bobi Lukman Piliang Wartawan, Perantau, Pengamat Politik, Wawancara, 2022.
- Fauzi Bahar. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Mantan Wali Kota Padang, Wawancara, 2022.
- Jasman Rizal, MM Sekretaris LKAAM, ASN Pemprov Sumbar, Wawancara, 2022.
- Ka'batu. Akademisi, Aktivistis Perempuan, Wawancara, 2022
- Kasmori Dt Rajo Nan Gadang, Tokoh Adat, Wawancara, 2022
- Heranof Firdaus, Wartawan Utama, Budayawan, Wawancara, 2022.
- Maidestal Hari Mahesa, Kader PPP, Aktivistis, Wawancara, 2022
- Muhammad Arif Parpatiah Nan Sati, Tokoh Agama dan Adat, Wawancara: 2022
- Irawadi Uska, Tokoh Agama, ASN Kemenag Solok, Wawancara, 2022.
- Suardi Sikumbang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Banda Sapuluah, Pesisir Selatan, ASN UIN Imam Bonjol Padang, Wawancara, 2022
- Safnir Azzam. Guru Agama MAN Agam, Aktivistis 98. Wawancara, 2022
- Zainal Tuanku Mudo, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Wawancara, 2022